

Restrukturisasi Sistem Produksi Perunggasan di Indonesia



Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Departemen Pertanian
2006



RESTRUKTURISASI SISTEM PRODUKSI PERUNGGAN DI INDONESIA

Penyunting : Dr. Ismeth Inounu
Ir. Atien Priyanti, M.Sc.
Dr. Eny Martindah
Drh. Imas Sri Nurhayati
Ratna Ayu Saptati, S.Pt., M.Si.

Diterbitkan oleh :
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Jalan Raya Pajajaran Kav. E 59, Bogor 16151
Telp. (0251) 322185, 328383, 322138
Fax. (0251) 328382, 380588
E-mail: criansci@indo.net.id

ISBN 978-979-8308-62-8

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BOGOR
2006**

RESTRUKTURISASI SISTEM PRODUKSI PERUNGGAN DI INDONESIA

Hak Cipta © 2006. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Jalan Raya Pajajaran Kav. E – 59, Bogor 16151

Telp. : (0251) 322185, 328383, 322138

Fax. : (0251) 328382, 380588

E-mail : criansci@indo.net.id

Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Restrukturisasi Sistem Produksi Perunggan di Indonesia / Ismeth
Inounu dkk. - Bogor : Pusat Penelitian dan Pengembangan
Peternakan, 2006
v + 21 hlm.; illus.; 20 cm.

ISBN 978-979-8308-62-8

1. Unggas	2. Restrukturisasi	3. Sistem Produksi
I. Judul	II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan	
	III. Ismeth Inounu (Eds.)	

636.5

KATA PENGANTAR

Revitalisasi pertanian perikanan dan kehutanan (RPPK) yang telah dicanangkan oleh Presiden RI, pada tanggal 11 Juni 2005 di Jatiluhur, Jawa Barat telah direspon Departemen Pertanian dengan menetapkan 17 komoditas sebagai unggulan, 3 diantaranya merupakan komoditas peternakan yaitu sapi, unggas (ayam ras, ayam kampung dan itik) serta kambing dan domba. Revitalisasi peternakan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak, menyediakan pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan dan membangun SDM berkualitas. Perunggasan di Indonesia merupakan ujung tombak dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi protein hewani, dimana saat ini memberikan kontribusi sebesar 60,73 persen yang diikuti oleh daging sapi sebesar 23,39 persen.

Berdasarkan sistem produksinya, industri perunggasan di Indonesia dibagi ke dalam 4 sektor dengan porsi terbesar jumlah peternak yang terlibat di sektor 3 dan 4. Sektor ini memiliki sebaran yang luas hampir di seluruh wilayah di tanah air. Namun demikian, dibandingkan dengan sektor 1 dan 2, sektor 3 dan 4 mempunyai kelemahan dalam hal sistem kesehatan hewan, sehingga dengan merebaknya kasus penyakit Flu Burung sejak pertengahan tahun 2003 sektor ini perlu mendapat perhatian yang serius, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengendalian dan pencegahan mewabahnya kasus penyakit Flu Burung yang tak kunjung reda dan dipandang perlu untuk segera dilakukan tata ulang atau restrukturisasi sistem produksi perunggasan di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Tim Analisis Kebijakan Puslitbang Peternakan telah berhasil menyusun konsep awal

restrukturisasi sistem produksi perunggasan di Indonesia. Hal ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan workshop/lokakarya dan diskusi internal serta verifikasi hasil di lapang. Berbagai pelaku usaha dan instansi terkait ikut terlibat dalam kegiatan ini seperti penentu kebijakan, akademisi, asosiasi dan organisasi profesi serta praktisi perunggasan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berhasilnya program restrukturisasi sistem produksi perunggasan di Indonesia.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya dokumen ini. Buku ini merupakan dokumen dinamis yang dirasakan masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan saran yang bermanfaat guna meningkatkan kualitas sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat berguna bagi para pembaca untuk implementasi program perunggasan lebih lanjut di masa-masa yang akan datang.

Bogor, Nopember 2006
Kepala Puslitbang Peternakan

Dr. Ismeth Inounu
NIP. 080 056 205

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Pendahuluan.....	1
Tahapan Kegiatan.....	2
Restrukturisasi Sistem Produksi Perunggasan Indonesia.....	5
I. Aspek kesadaran masyarakat (<i>public awareness</i>) tentang pengendalian dan pencegahan penyakit Avian Influenza dan zoonosis lainnya di Indonesia.....	6
II. Aspek budidaya unggas pada sektor 3 dan 4.....	10
III. Aspek lalulintas dan pemasaran unggas hidup dan produk unggas.....	14
IV. Matriks restrukturisasi perunggasan Indonesia.....	18
Tim Perumus.....	21

PENDAHULUAN

Usaha peternakan unggas mempunyai prospek pasar yang sangat baik karena didukung oleh karakteristik produknya yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim, harga relatif murah dengan kemudahan akses untuk memperoleh karena sudah merupakan barang publik. Komoditas ini juga berperan nyata dalam ketahanan pangan nasional melalui penyediaan protein hewani dan penyedia lapangan kerja baik di perdesaan maupun perkotaan. Secara nasional industri perunggasan merupakan pemicu utama pertumbuhan pembangunan di sub sektor peternakan.

Usaha perunggasan di Indonesia sangat beragam baik dari jenis komoditas yang diusahakan, maupun skala ekonomi masing-masing usaha. Usaha peternakan ayam ras merupakan suatu industri yang sudah terintegrasi secara vertikal mulai dari industri hulu sampai hilir. Pada umumnya usaha ini dikelola dengan manajemen profesional dan menggunakan input teknologi maju/modern dengan tetap mempertimbangkan tingkat efisiensi usaha yang layak. Namun, tidak demikian halnya dengan usaha peternakan unggas lokal seperti ayam kampung, itik, burung puyuh dan lain sebagainya. Sampai dengan akhir tahun 2005 nilai investasi sektor perunggasan mencapai Rp 38,5 trilyun dengan omset sebesar Rp 41,5 trilyun.

Merebaknya wabah penyakit Flu Burung (*Avian Influenza*) akhir-akhir ini telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi industri perunggasan, mencapai sekitar Rp 3,87 trilyun. Banyaknya ternak unggas yang mati maupun dimusnahkan akibat penyakit ini mengakibatkan konsumen ragu untuk mengkonsumsi produk unggas yang secara tidak langsung berdampak terhadap sektor budidaya. Masalah utama yang menyebabkan sulitnya penanggulangan kasus Flu Burung adalah

adanya usaha-usaha peternakan unggas dengan skala non komersial pada lokasi yang tersebar, sehingga jumlah dan keberadaannya sulit dikontrol.

Sulitnya pengawasan tempat pemotongan ayam (TPA) di luar RPA, tempat penjualan unggas hidup dan produknya serta lalulintas unggas dan produknya juga masih menjadi kendala utama. Hal ini didukung pula oleh penerapan aspek biosekuriti, manajemen perkandangan dan tata ruang, serta penerapan program vaksinasi yang belum dilakukan secara komprehensif dan masih bersifat parsial karena berbagai keterbatasan yang dimiliki pada usaha peternakan skala rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan tekad kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan para pelaku usaha peternakan unggas, Puslitbang Peternakan melalui tim Analisis Kebijakan telah berupaya untuk memberikan masukan/saran dan rekomendasi kepada pemerintah tentang pentingnya mewujudkan program restrukturisasi sistem produksi perunggasan di Indonesia. Penyusunan konsep ini dilakukan melalui berbagai kegiatan workshop/lokakarya dan diskusi internal serta verifikasi di lapang. Berbagai pelaku usaha dan instansi terkait turut terlibat dalam kegiatan penyusunan konsep awal restrukturisasi sistem produksi perunggasan di Indonesia.

TAHAPAN KEGIATAN

Pertemuan tim Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN) yang dimotori oleh PROF. DR. BAYU KRISNAMURTI pada awal tahun 2006 mengungkapkan salah satu kebijakan pokok untuk menuntaskan pemberantasan wabah penyakit Flu Burung di sektor 3 dan 4. Salah satu strategi yang diusulkan adalah reka-ulang sistem produksi perunggasan yang meliputi (a) pembenahan pasar ayam kolektif, (b) pengembangan model-

model peternakan tangguh, dan (c) fasilitasi kredit usaha dengan suku bunga rendah. Sasaran program lebih ditujukan pada usaha di sektor 3 dan 4 karena pola pengendalian serangan penyakit Flu Burung pada sektor ini sulit dilakukan. Hal ini lebih disebabkan karena faktor ketidaktahuan peternak (misalnya membuang bangkai unggas di sungai atau tempat sampah), sehingga terjadi wabah baru, serta adanya "*shedding virus*" yang menjadi sumber infeksi pada ayam lain. Restrukturisasi sistem produksi perunggasan pada sektor ini harus dilakukan secara bertahap, diawali dengan sosialisasi dan pemahaman tentang kerugian dan dampak sosial ekonomi yang dapat dialami oleh peternak maupun masyarakat.

Sebagai tahap awal telah dilakukan *brainstorming* oleh tim Analisis Kebijakan Puslitbang Peternakan pada tanggal 9 Juni 2006 dalam rangka menyikapi usulan tim KPEN untuk menyusun konsep restrukturisasi sistem perunggasan di Indonesia. Pada tanggal 12 Juni 2006 dilakukan pertemuan lanjutan dengan pelaku usaha perunggasan pada sektor 3 dan 4, yaitu H. SUDARTO IRAWAN (peternak ayam ras di Kabupaten Sukabumi), PETER (peternak ayam di Kabupaten Sukabumi) dan EKO WAKRADIHARJA (peternak ayam buras di DKI Jakarta). Informasi yang diperoleh dari hasil pertemuan tersebut digunakan untuk menyusun konsep awal Restrukturisasi Sistem Produksi Perunggasan Indonesia. Konsep ini kemudian dilengkapi dengan masukan dari berbagai pihak diantaranya Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, BPTP DKI Jakarta, BPTP Jawa Timur, BPTP Bengkulu, BPTP Jambi, BPTP Sulawesi Selatan dan Masyarakat Ilmu Perunggasan Indonesia (MIPI).

Puslitbang Peternakan bekerjasama dengan Fakultas Peternakan, Universitas Diponegoro telah melaksanakan suatu Lokakarya Nasional Inovasi Teknologi dalam Mendukung Usahaternak Unggas Berdayasaing pada tanggal 4 Agustus 2006 di Semarang. Pembicara utama IR. H. DON P UTOYO dari Forum

Masyarakat Perunggasan Indonesia menyampaikan gagasan tentang tata ulang sistem produksi perunggasan di Indonesia. Pemikiran tentang strategi pengendalian penyakit unggas di sektor 3 dan 4 oleh DR. ABDUL ADJID dari Balai Besar Penelitian Veteriner turut melengkapi gagasan untuk menjadikan konsep restrukturisasi sistem perunggasan menjadi suatu program aksi. Hasil lokakarya merumuskan bahwa dalam upaya meningkatkan usaha ternak unggas menuju kemandirian usaha, diperlukan tata ulang sistem produksi unggas nasional dengan menerapkan *good farming practices*, terutama di sektor 3 dan 4. Konsep tata ulang sistem produksi unggas, utamanya pada sektor 3 dan 4 menjadi hal yang sangat penting dan strategis untuk mengatasi dan mencegah terjangkitnya penyakit Flu Burung di Indonesia. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan tata ruang antara lain sosialisasi pengandangan, tempat-tempat pemotongan serta pasar unggas.

Konsep awal dilengkapi dengan hasil rumusan lokakarya menjadikan dokumen lebih komprehensif disertai dengan usulan dalam bentuk matriks program. Guna memperoleh masukan dan saran nyata dari instansi terkait, pada tanggal 24 November 2006 dilakukan pertemuan dengan Dinas Peternakan Kabupaten dan Sub Dinas Peternakan Kota Bogor. Hal ini bertujuan untuk mengkonfirmasi beberapa aspek kebijakan dan strategi yang diusulkan terkait dengan kebijakan tata ruang, usaha perunggasan, pengawasan sistem pemasaran unggas hidup, pengawasan RPA/TPA serta sistem rantai pemasaran dan distribusi ternak unggas. Verifikasi lapang di tempat pemotongan ayam tradisional dilakukan baik di pasar maupun yang ada di lokasi pemukiman di wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

RESTRUKTURISASI SISTEM PRODUKSI PERUNGGASAN INDONESIA

Usaha perunggasan di Indonesia terbagi dalam 4 kelompok skala usaha dan manajemen budidaya, yaitu skala besar dan modern (sektor 1 dan 2) serta skala kecil dan konvensional (sektor 3 dan 4). Perbedaan skala usaha tersebut membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda pula, karena kebijakan yang diterapkan pada skala besar tidak dapat diaplikasikan pada skala kecil atau sebaliknya. Oleh karenanya diperlukan dukungan aturan/perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menyediakan infrastruktur budidaya usaha ternak unggas yang memadai. Sistem produksi bibit ayam ras telah terstruktur dengan baik yang dilakukan oleh swasta, sehingga peran pemerintah diperlukan dalam hal pengawasan mutu dan sistem peredarannya. Guna menjamin kestabilan dan kelancaran penyediaan DOC ayam ras, maka potensi yang ada harus dimanfaatkan. Untuk itu, pengawasan mutu, lalu lintas antar wilayah, retribusi dan iuran harus bersifat kondusif.

Dalam rangka mempercepat peningkatan produksi dan produktivitas ternak unggas, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, pemerintah telah menetapkan pembinaannya melalui pendekatan kelompok dalam suatu kawasan. Melalui pendekatan kawasan tersebut diharapkan dapat mempermudah pembinaan, akses permodalan dan akses pemasaran, disamping akses distribusi terhadap sumber input. Konsep industri perunggasan diharapkan berubah menjadi usaha yang terintegrasi secara vertikal dengan upaya menghasilkan *profit centre* dalam satu kesatuan, dan meminimalkan *cost centre*.

Kebijakan promosi, *public awareness* terhadap keamanan mengkonsumsi produk asal unggas menjadi penting, disamping

RESTRUKTURISASI SISTEM PRODUKSI PERUNGGASAN INDONESIA

Usaha perunggasan di Indonesia terbagi dalam 4 kelompok skala usaha dan manajemen budidaya, yaitu skala besar dan modern (sektor 1 dan 2) serta skala kecil dan konvensional (sektor 3 dan 4). Perbedaan skala usaha tersebut membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda pula, karena kebijakan yang diterapkan pada skala besar tidak dapat diaplikasikan pada skala kecil atau sebaliknya. Oleh karenanya diperlukan dukungan aturan/perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menyediakan infrastruktur budidaya usaha ternak unggas yang memadai. Sistem produksi bibit ayam ras telah terstruktur dengan baik yang dilakukan oleh swasta, sehingga peran pemerintah diperlukan dalam hal pengawasan mutu dan sistem peredarannya. Guna menjamin kestabilan dan kelancaran penyediaan DOC ayam ras, maka potensi yang ada harus dimanfaatkan. Untuk itu, pengawasan mutu, lalu lintas antar wilayah, retribusi dan iuran harus bersifat kondusif.

Dalam rangka mempercepat peningkatan produksi dan produktivitas ternak unggas, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, pemerintah telah menetapkan pembinaannya melalui pendekatan kelompok dalam suatu kawasan. Melalui pendekatan kawasan tersebut diharapkan dapat mempermudah pembinaan, akses permodalan dan akses pemasaran, disamping akses distribusi terhadap sumber input. Konsep industri perunggasan diharapkan berubah menjadi usaha yang terintegrasi secara vertikal dengan upaya menghasilkan *profit centre* dalam satu kesatuan, dan meminimalkan *cost centre*.

Kebijakan promosi, *public awareness* terhadap keamanan mengkonsumsi produk asal unggas menjadi penting, disamping

ketersediaan SDM peternakan mendukung terlaksananya dengan baik penerapan kebijakan menuju usaha ternak unggas yang mandiri dan berdayasaing. Kenyataan bahwa usaha ternak unggas masih belum pulih dari mewabahnya penyakit Flu Burung, maka diperlukan sosialisasi dan proses edukasi yang terus menerus kepada masyarakat/peternak/petugas tentang inti dari pengendalian dan pencegahan penyakit, yakni: biosekuriti, vaksinasi, pengobatan serta *stamping out/culling*.

I. Aspek Kesadaran Masyarakat (*Public Awareness*) tentang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit *Avian Influenza* dan Zoonosis lainnya di Indonesia

Kejadian penyakit *Avian Influenza* (AI) mempunyai dampak yang cukup serius secara lintas sektoral. Salah satu bukti adalah timbulnya kepanikan sebagian masyarakat untuk mengkonsumsi telur dan daging ayam. Penyuluhan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian pelaku usaha peternakan unggas dan masyarakat umum terhadap pencegahan penyakit flu burung melalui penerapan biosekuriti, pencegahan dini, kepedulian perlunya kebersihan lingkungan dan cara-cara pemeliharaan ternak unggas yang baik dan benar. Untuk itu perlu penyampaian informasi yang seimbang kepada masyarakat tentang dampak penyakit flu burung terhadap kesehatan manusia.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang penyakit flu burung dan dampaknya baik terhadap kesehatan manusia maupun industri perunggasan nasional merupakan salah satu program yang harus ditempuh dalam kaitannya dengan rencana tata ruang sistem industri perunggasan.

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pengendalian dan pencegahan penyakit flu burung, diantaranya:

1. Mendiseminasikan pengetahuan tentang penyakit flu burung dan zoonosis lainnya, mulai dari penyebab sampai kepada akibatnya, kepada masyarakat luas.
2. Memberdayakan masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan surveilans untuk penanggulangan penyakit flu burung atau zoonosis lainnya dan membangun jejaring antar pelaku usaha perunggasan, utamanya peternak skala menengah dan kecil.
3. Melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan berdasarkan hasil kajian teknis, ekonomi dan sosial sesuai dengan budaya masyarakat setempat.
4. Membangun citra Indonesia di dunia, regional maupun internasional tentang upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka menanggulangi penyakit flu burung atau zoonosis lainnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut:

1. Perlu jaringan masyarakat untuk melakukan surveilans dan pencegahan penyakit flu burung atau zoonosis lainnya mulai tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota.
2. Perlu organisasi pelaku usaha ternak unggas skala kecil dan menengah di setiap propinsi.
3. Peningkatan publikasi dan komunikasi tentang penyakit flu burung atau zoonosis lainnya melalui media elektronik, media massa, penyebaran leaflet/brosur, seminar, pelatihan, dan lain sebagainya.
4. Sosialisasi kepada konsumen tentang pembelian produk yang aman serta sosialisasi melalui mass media "TIDAK TAKUT MAKAN DAGING AYAM".

Beberapa program dan atau kegiatan pokok yang diusulkan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya flu burung atau zoonosis lainnya adalah:

1. Pembentukan organisasi peternak skala kecil dan menengah dalam upaya pembinaan yang efektif dan efisien.
2. Pengembangan komunikasi publik dalam hal mendiseminasikan cara-cara pencegahan dan pengendalian penyakit flu burung. Hal ini dapat dilakukan melalui pembuatan dan penyebaran informasi tentang *good farming practice* melalui media elektronik, media massa, leaflet/brosur (dalam jumlah yang memadai), seminar, pelatihan dsb. Penyebaran informasi melalui media elektronik (TV dan radio) hendaknya dilakukan secara intensif pada stasiun-stasiun yang dapat menjangkau secara luas seluruh wilayah Indonesia, demikian pula halnya dengan penyiaran di stasiun radio lokal (RRI/Komersial).
3. Penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam hal surveilans dan pencegahan penyakit flu burung atau zoonosis lainnya.
4. Pembentukan suasana yang harmonis dan kondusif terhadap kelompok khusus seperti legislatif, pelajar, pendidik, masyarakat perunggasan, tokoh masyarakat, komunitas kesehatan/veteriner, komunitas perdagangan, dan lain-lain.

Apresiasi terhadap program konsumsi produk unggas ASUH melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal.

Upaya Pemerintah

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengendalian dan pencegahan penyakit flu burung, diantaranya:

1. Pembuatan booklet, poster, *flyer* maupun *banner* yang memuat informasi tentang penyakit flu burung, namun jumlahnya belum memadai untuk mencakup seluruh elemen masyarakat.
2. Penyiaran 'radio commercial' (iklan biosekuriti dan vaksinasi) di stasiun radio lokal. Hal ini hanya berlangsung selama satu minggu karena keterbatasan anggaran/ dana, sehingga belum efektif mencapai sasaran secara luas.
3. Iklan layanan masyarakat mengenai pola hidup sehat (TUMPAS AI), tetapi belum memuat iklan masyarakat tentang pentingnya program vaksinasi pada unggas yang dapat ditayangkan secara intensif di stasiun TV yang dapat menjangkau secara luas seluruh wilayah Indonesia.

Pemberdayaan SDM

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap budidaya usaha ternak unggas yang baik dan kesadaran untuk mengkonsumsi pangan bergizi menjadi tanggung jawab bersama. Selain pemerintah pusat, perlu peningkatan peran lembaga riset, perguruan tinggi, aparat pemda, dinas terkait, kesehatan hewan (Tenaga Teknis Peternakan (Penyuluh/PPL, inseminator, Pemeriksa kebuntingan, Asisten Teknis Reproduksi (ATR)), organisasi profesi (ISPI, PDHI, PPSKI, APFINDO, GPPMT, ASOHI, GPPU, HPDKI), LSM, pemuka agama, tenaga pengajar, masyarakat dan TNI.

II Aspek Budidaya Unggas pada Sektor 3 dan 4

1. Usulan Aturan Budidaya Unggas

- a. Perlu kawasan usaha peternakan (KUNAK) unggas di setiap wilayah (Kecamatan/Kabupaten) bagi sektor 3, sebagai upaya untuk memudahkan dalam monitoring dan penanganan apabila terjadi wabah.
- b. Lokasi KUNAK ditetapkan dengan peraturan daerah agar kawasan tersebut dapat digunakan untuk jangka panjang.
- c. Bagi sektor 4 dan usaha ternak bersifat hobi/kesenangan yang tidak ditempatkan pada satu kawasan, perlu penyediaan kandang unggas dengan/tanpa tempat umbaran di setiap rumah.
- d. Jumlah pemeliharaan ternak perlu dibatasi berdasarkan kesepakatan (misalnya maksimal 30 ekor).
- e. Jika telah melebihi atau sudah menjadi usaha sampingan perlu dicari lokasi alternatif baru di luar pemukiman atau bergabung dengan KUNAK.
- f. Perlu ada pelarangan *mixed farming practice* terut ama antara ayam, itik, entog dengan babi dalam satu kawasan.
- g. Perlu aturan pelarangan usaha budidaya komersial dalam satu kawasan dengan industri perbibitan, sesuai peraturan yang ada.
- h. Perlu ada pedoman dan sosialisasi pengandangan ternak unggas di wilayah pemukiman pada sektor 4 yang tertata.
- i. Pelaksanaan pelayanan usaha peternakan unggas sektor 3 sebagian besar dilakukan pada usaha yang sudah berjalan dengan mempertimbangkan aspek teknis dan aspek administrasi. Aspek teknis berdasarkan kesesuaian dengan teknis usaha peternakan baik lahan, kandang dan pengelolaan usaha. Sedangkan aspek administrasi meliputi persyaratan yang harus dimiliki berupa persetujuan

lingkungan masyarakat dan surat keterangan usaha yang diketahui oleh kepala desa setempat.

- j. Penataan dan pembinaan teknik budidaya dengan pendekatan secara kelompok bagi peternak di sektor 4.

2. Biosekuriti: (berlaku umum untuk pencegahan penyebaran penyakit)

- a. Biosekuriti adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan penularan/kontak dengan ternak tertular, sehingga rantai penyebaran penyakit dapat diminimalkan.
- b. Perlu sosialisasi pelaksanaan biosekuriti di setiap sektor usaha dan masyarakat. Sosialisasi sederhana seperti kebiasaan mencuci tangan dengan sabun atau desinfektan setelah mengurus ternak kesayangannya, membersihkan kandang bila ayam-ayamnya mati mendadak dan menyemprot kandang serta peralatannya dengan desinfektan. Darah, bulu dan kotoran serta bangkai harus dikubur atau disiram desinfektan/minyak tanah, harus diperkenalkan dan ditekankan pada masyarakat. Jika mendapati ada kematian ayam atau burung dengan jumlah dan gejala tidak wajar, dapat menghubungi Dinas Peternakan setempat untuk mendapat bantuan.
- c. Perlu prototipe kandang sistem *knock down* yang mudah diaplikasikan dan murah sehingga terjangkau oleh masyarakat.
- d. Perlu pemrosesan limbah padat dan cair (pupuk, pakan, dan lain-lain). Pada usaha pemotongan rumahan, diharuskan mempunyai tempat penampungan/pembuangan (bak, kolam kering) dengan kedalaman yang berbeda untuk penampungan limbah cair (air pencuci

- produk), dan diberi mikroba untuk membunuh bakteri patogen.
- e. Penerapan program desinfeksi/penyucihamaan secara rutin sesuai standar dengan fasilitas yang memadai.
 - f. Truk atau armada angkutan dan keranjang angkut ayam yang dipakai mengantar ayam ke pangkalan ayam harus dibersihkan/disemprot dengan desinfektan. Design truk angkut perlu dirubah agar tidak mencemari udara selama pengangkutan.
 - g. Pangkalan ayam (tempat jual ayam hidup/grosir) harus mempunyai fasilitas untuk membersihkan truk dan perabotnya.
 - h. Perlu ada sertifikasi dan labeling bagi usaha yang telah menerapkan standar biosekuriti.
 - i. Penyediaan tempat pemusnahan ayam sakit/mati yang ramah lingkungan.

3. Vaksinasi

- a. Perlu adanya pedoman vaksinasi pada unggas selama pemeliharaan.
 - Program vaksinasi dan kejelasannya harus disiapkan oleh Dinas Peternakan terdekat, dimana peternak maupun orang awam dapat mudah menghubunginya.
 - Posko untuk AI (flu-burung) dapat dihubungi 24 jam dan dikoordinir oleh Dinas Peternakan setempat.
 - Vaksin harus mudah didapat dan tersedia di *poultry-shop*/ penjual sapronak.
- b. Perlu vaksinasi pada burung liar melalui pakan di habitatnya serta sekitar kawasan peternakan unggas guna mencegah penyebaran penyakit.

- c. Penerapan vaksinasi secara mandiri dan swadana pada usaha peternakan unggas sektor 1 dan 2 dan usaha KUNAK.
- d. Diperlukan produk vaksin dengan kemasan (stok) dan harga terjangkau serta kualitas yang terjamin.
- e. Perlu bantuan pemerintah dalam ketersediaan vaksin agar peternak skala kecil di semua daerah mendapat vaksin dan vaksinasi secara gratis.
- f. Pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah bagi peternakan di sektor 4. Bantuan pelaksanaan program vaksinasi bagi peternak rakyat/kecil dapat melalui program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
- g. Penegakan aturan terhadap program vaksinasi yang harus selalu disertai dengan penerapan biosekuriti sesuai standar.
- h. Monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan perlindungan dan keamanan vaksinasi.
- i. Monitoring sesudah vaksinasi harus dilakukan oleh Dinas Peternakan setempat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan vaksinasi.
- j. Pencatatan dengan baik tentang kejadian wabah, vaksinasi, program biosekuriti dan hasil monitoring pada sektor 3 dan 4.
- k. Perlu ada pelayanan kesehatan terpadu melalui optimalisasi penggunaan laboratorium dan pos-pos kesehatan hewan yang tersedia di setiap kecamatan.
- l. Perlu peningkatan kemampuan tenaga terampil pada laboratorium dan poskeswan yang ada didukung dengan kerjasama penyuluhan yang terpadu.
- m. Peningkatan jangkauan kerja petugas lapangan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

III. Aspek Lalulintas dan Pemasaran Unggas Hidup dan Produk Unggas

Salah satu cara penyebaran wabah penyakit unggas adalah melalui lalu lintas berbagai jenis unggas hidup dan produknya, terutama lewat pasar ayam/burung. Selain itu perdagangan antar pulau, antar propinsi maupun antar kabupaten/kota, karena frekuensinya sangat tinggi sehingga sulit dipantau, jelas memiliki pengaruh sangat nyata. Hal ini pula yang merupakan salah satu penyebab penyebaran penyakit AI dalam kurun waktu 3 tahun (2003-2006) semakin meluas (MARTINDAH, *et. al.* 2005).

Meskipun peraturan lalu lintas unggas hidup, DOC, dan produk unggas sudah ada (DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI PETERNAKAN, 2004), pengawasan lalu lintas dan pemasaran unggas hidup maupun produk unggas sangat penting diperhatikan, sebagai upaya penanggulangan dan pengendalian penyakit unggas menular secara konsisten dan berkesinambungan.

1. Penegakan aturan SK Dirjen Bina Produksi Peternakan No. 17/Kpts/PD.640/F/02 tentang Pedoman, Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Influenza pada unggas (*Avian Influenza*) yang berkaitan dengan pengendalian lalu lintas.

- a. Pengawasan lalu lintas di lokasi peternakan dan lokasi penampungan unggas perlu dilaksanakan oleh Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.
- b. Membatasi secara ketat lalu lintas unggas, produk unggas, pakan dan material kontaminan lain seperti kotoran, bulu, litter/alas kandang, sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

- c. Pengawasan lalu lintas antar area terhadap unggas hidup dan produk unggas harus dilakukan secara ketat oleh Badan Karantina Pertanian cq. Pusat Karantina Hewan.
- d. Pengaktifan kembali pos-pos pengawasan lalu lintas unggas antar daerah.
- e. Otonomi Daerah di masing-masing daerah harus menyesuaikan dengan SK Dirjen Bina Produksi Peternakan No. 17/Kpts/PD.640/F/02.

2. Perlu komitmen yang tinggi dari instansi yang berwenang terutama dalam mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Perlu adanya kesadaran dari peternak/pelaku/pedagang ternak untuk mendapat SKKH secara legal

- a. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak karantina hewan pada instalasi-instalasi karantina hewan dan pos-pos pengawasan lalu lintas hewan antar pulau, propinsi, kabupaten/kota.

3. Peraturan strategi distribusi dan transportasi karkas unggas untuk wilayah-wilayah tertentu sebagai pusat konsumen

- a. Pada wilayah-wilayah tertentu yang padat penduduknya seperti DKI Jakarta yang juga merupakan pusat konsumen produk unggas sudah waktunya untuk memberlakukan aturan strategi distribusi dan transportasi unggas dalam bentuk karkas misalnya dengan relokasi peternakan dan tempat pemotongan ayam di luar kota.

4. Penyediaan sarana dan fasilitas transportasi yang memenuhi persyaratan teknis dan hygienis

- a. Pengawasan lalu lintas hewan dan produknya perlu dilakukan secara maksimal, untuk itu perlu adanya pemeriksaan kesehatan unggas secara cepat pada pos-pos pengawasan lalu lintas hewan dengan tes sederhana.
- b. Jika hasil tes ada yang mencurigakan perlu dilakukan prosedur tetap untuk pengamanan.
- c. Perlu fasilitas transportasi karkas unggas dan produk unggas yang memenuhi persyaratan teknis maupun hygienis.

5. Relokasi bagi penjualan unggas hidup dan tempat pemotongan ayam (TPA)

- a. Penyediaan lokasi yang representatif bagi penjualan unggas hidup di pasar-pasar, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga terdapat pemisahan tempat penjualan unggas hidup dari produknya.
- b. Relokasi tempat penampungan ayam dan tempat pemotongan ayam milik perorangan termasuk penyediaan tempat pembuangan limbah dan *cooling* unit.
- c. Revitalisasi penggunaan rumah potong ayam (RPA) agar tidak terjadi pencemaran silang antar ruangan, sehingga diperoleh kualitas karkas unggas yang hygienis.
- d. Perlu pengawasan RPA/TPA terhadap (i) aspek kehalalan; (ii) penggunaan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk jaminan kualitas; (iii) pemeriksaan bahan makanan tambahan; (iv) pemeriksaan antemortem khususnya terhadap penyakit Avian Influenza; serta (v) jaminan kualitas daging ayam bagi konsumen.

6. Peraturan alokasi satu hari libur dalam satu minggu bagi penjualan dan pemotongan unggas di setiap pasar

- a. Pengaturan satu hari libur dalam satu minggu bagi penjualan dan pemotongan unggas di setiap pasar pada suatu wilayah dapat diberlakukan secara bergiliran. Dengan demikian kecukupan akan unggas tetap terpenuhi dan biosekuriti untuk meningkatkan sanitasi lingkungan dapat dilaksanakan setiap satu minggu sekali.
- b. Perlu adanya prosedur baku untuk melakukan *pengujian cepat* dengan menggunakan tes kit sederhana terhadap kesehatan unggas yang diperjualbelikan.
- c. Perlu pengawasan pada proses pemasaran unggas/karkas meliputi (a) pemeriksaan Surat Keterangan menyatakan bebas AI (30 hari); (b) Surat Keterangan menyatakan bebas terhadap bahan makanan tambahan (formalin, zat warna); (c) Surat Keterangan Kesehatan daging Unggas (surat jalan).

IV. MATRIKS RESTRUKTURISASI PERUNGGASAN INDONESIA

Aspek Utama	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
I. Public Awareness				
	(i) Peningkatan wawasan dan kemampuan masyarakat untuk berusaha ternak unggas yang baik.	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam beternak unggas.	2006-2007	DitjenNak, Dinas terkait, Penyuluh
	(ii) Apresiasi terhadap program konsumsi produk unggas ASUH melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal	Menumpas keresahan masyarakat dalam mengkonsumsi produk unggas.	2006-2007	Swasta, DitjenNak, Pemda, Dinas terkait
II. Budidaya				
a. Tata ruang	(i) Pewilayahan kawasan usaha peternakan unggas (KUNAK) bagi sektor 3 dan 4.	Perda dan terbentuknya kawasan peternakan unggas.	2007-2008	DitjenNak, Pemda
	(ii) Peraturan pelarangan <i>Mixed Farming Practise</i> (ayam, itik, entog dan babi) dalam satu kawasan.	Permentan/SK/Perda dan Pedoman	2006-2007	DitjenNak, Pemda
		Sosialisasi Permentan/SK/Perda dan Pedoman pelarangan <i>Mixed Farming Practise</i> .	2007-2008	DitjenNak, Pemda, Dinas terkait
		Pengendalian penyakit di sektor 3 dan 4	2007-2008	Pemda, Dinas terkait
	(iii) Peraturan pelarangan usaha budidaya komersial dalam satu kawasan dengan industri perbibitan.	Pewilayahan usaha budidaya komersial dengan industri perbibitan.	2008	Swasta, BUMN, Pemda, Dinas terkait
b. Biosekuriti	(i) Sosialisasi pelaksanaan biosekuriti di setiap sektor usaha	Pelaksanaan biosekuriti sesuai standar.	2006-2007	DitjenNak, Badan Litbang Pertanian
	(ii) Pedoman pengandangan ternak unggas pada sektor 4.	Buku pedoman sistem pengandangan ternak unggas yang tertata.	2006-2007	DitjenNak, Pemda, Dinas terkait
		Sosialisasi sistem pengandangan.	2007-2008	DitjenNak, Pemda, Dinas terkait
		Kesadaran masyarakat dalam pengandangan ternak unggas.	2007-2008	Dinas terkait Pemda, Dinas terkait

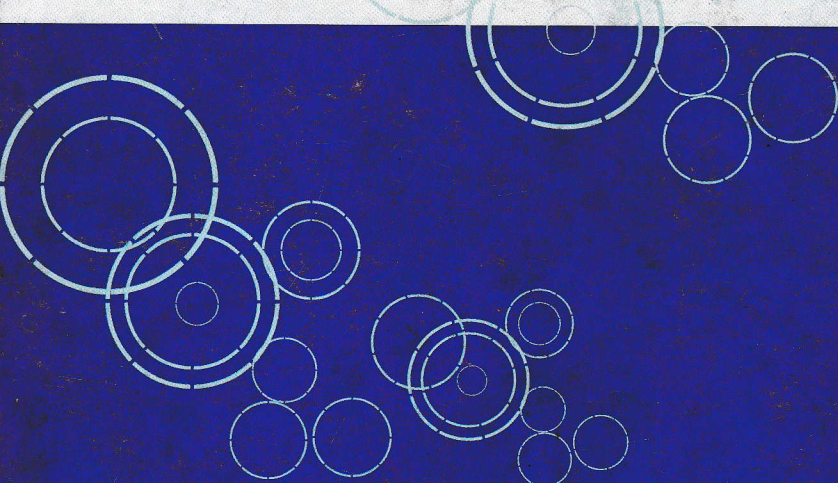
Aspek Utama	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
c. Vaksinasi	(iii) Pemberian vaksin melalui pakan pada burung liar di habitatnya serta sekitar kawasan peternakan unggas.	Pengendalian penyakit yang ditularkan oleh burung liar.	2006-2007	DitjenNak, Pemda, Dinas terkait
	(iv) Pemanfaatan limbah padat (pupuk, pakan dan lain-lain).	Termanfaatkan-nya limbah peternakan dan terjaganya sanitasi lingkungan.	2006-2007	Swasta, Pemda, Dinas terkait, masyarakat
	(v) Penerapan program desinfeksi/penyucihamaan secara rutin sesuai standar dengan fasilitas yang memadai.	Sanitasi lingkungan peternakan.	2006-2007	DitjenNak, Pemda, Dinas terkait
	(vi) Penyediaan tempat pemusnahan ayam sakit/mati yang ramah lingkungan.	Pengendalian penyebaran penyakit dan menjaga sanitasi lingkungan.	2006-2007	Swasta, Pemda, Dinas terkait
	(i) Pedoman vaksinasi pada unggas induk/bibit, DOC, DOD selama pemeliharaan.	Buku pedoman vaksinasi.	2006-2007	DitjenNak
	(ii) Penerapan vaksinasi secara mandiri dan swadana pada usaha peternakan unggas skala komersial dan usaha KUNAK.	Partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian penyakit.	2006-2007	Swasta, Masyarakat, DitjenNak, Pemda
	(iii) Pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah bagi peternakan di sektor 4.	Cakupan vaksinasi di sektor 4 lebih optimal.	2006-2007	DitjenNak, Dinas terkait
	(iv) Penegakan aturan terhadap program vaksinasi yang harus selalu disertai dengan penerapan biosekuriti sesuai standar	Penerapan program vaksinasi yang disertai dengan penerapan biosekuriti sesuai standar.	2006-2007	DitjenNak, Pemda, Dinas terkait, Badan Litbang Pertanian
	(v) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap tingkat perlindungan dan keamanan vaksin.	Informasi daya kerja vaksin.	2006-2007	DitjenNak, Pemda, Dinas terkait
	(vi) Pelayanan kesehatan terpadu melalui optimalisasi penggunaan laboratorium dan pos-pos kesehatan hewan yang tersedia di setiap kecamatan.	Revitalisasi fungsi laboratorium dan pos kesehatan hewan.	2006-2007	DitjenNak, Pemda, Dinas terkait

Aspek Utama	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
III. Lalu lintas				
1. Unggas dan produknya	(i) Penegakan aturan sesuai SK Dirjen Bina Produksi Peternakan No. 17/Kpts/PD. 640/F/02 tentang Pedoman Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (<i>Avian influenza</i>) yang berkaitan dengan pengendalian lalu lintas unggas, produk unggas serta limbah yang dihasilkan.	Pengendalian penyebaran penyakit.	2006-2007	DitjenNak, Pemda, Dinas terkait
	(ii) Peraturan strategi distribusi dan transportasi karkas unggas untuk wilayah-wilayah tertentu sebagai pusat konsumen.	Distribusi produk unggas yang ASUH.	2006-2007	Swasta, DitjenNak, pemda, Dinas terkait
	(iii) Penyediaan sarana transportasi yang memadai dengan fasilitas persyaratan teknis higienis dan sanitasi.	Jaminan keamanan pangan dalam mengkonsumsi produk unggas.	2006-2007	Swasta, DitjenNak, pemda, Dinas terkait
2. Pemasaran	(i) Penyediaan lokasi pasar yang representatif bagi penjualan unggas hidup dan TPA dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.	Tersedianya TPA dan tempat pemasaran unggas yang higienis.	2007	DitjenNak, Pemda, Dinas terkait
	(ii) Revitalisasi penggunaan rumah potong ayam (RPA) sehingga tidak terjadi pencemaran silang antar ruangan dengan sarana yang cukup sederhana.	Terjaminnya kualitas karkas unggas yang higienis.	2006-2007	Swasta, DitjenNak, Pemda, Dinas terkait
	(iii) Peraturan alokasi satu hari libur dalam satu minggu bagi penjualan dan pemotongan unggas di setiap pasar.	Terputusnya rantai penyebaran penyakit	2006-2007	DitjenNak, Pemda, Dinas terkait
	(vi) Model pasar hewan hidup dan produknya	Pewilayahan/pemisahan tempat penjualan unggas hidup dari spesies lainnya, unggas hidup dari produknya, unggas hidup dari tempat pemotongan, unggas hidup dari konsumen dan masyarakat umum.	2007-2010	Deptan, DitjenNak, Pemda, Dinas terkait

TIM PERUMUS

1. Prof. Dr. I Putu Kompiang – Balai Penelitian Ternak, Ciawi-Bogor
2. Prof. Dr. Subandriyo – Balai Penelitian Ternak, Ciawi-Bogor
3. Prof. Dr. Budi Tangendjaja – Balai Penelitian Ternak, Ciawi-Bogor
4. Dr. Joelal Achmadi – Universitas Diponegoro, Semarang
5. Dr. R.M. Abdul Adjid – Balai Besar Penelitian Veteriner, Bogor
6. Dr. Ismeth Inounu – Puslitbang Peternakan, Bogor
7. Dr. Argono Rio Setioko – Balai Penelitian Ternak, Ciawi-Bogor
8. Ir. H. Don P. Utoyo, MBA – Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia
9. Dr. Lies Parede – Balai Besar Penelitian Veteriner, Bogor
10. Dr. Beriajaya – Balai Besar Penelitian Veteriner, Bogor
11. Dr. Andi Djajanegara – Balai Penelitian Ternak, Ciawi-Bogor
12. Dr. Budi Haryanto – Balai Penelitian Ternak, Ciawi-Bogor
13. Ir. Atien Priyanti, M.Sc. – Puslitbang Peternakan, Bogor
14. Dr. Eny Martindah – Puslitbang Peternakan, Bogor
15. Drh. Sutrisno – Sub Dinas Peternakan, Kabupaten Bogor
16. Ratna Ayu Saptati, S.Pt., M.Si. – Puslitbang Peternakan, Bogor
17. Drh. Imas Sri Nurhayati – Puslitbang Peternakan, Bogor
18. Eko Wakradiharja – Praktisi Perunggasan di sektor 3 dan 4
19. Peter – Praktisi Perunggasan di sektor 3 dan 4
20. H. Sudarto Irawan – Praktisi Perunggasan di sektor 3 dan 4

ISBN 978-979-8308-62-8



Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

Jalan Raya Pajajaran Kav. E 59, Bogor 16151

Telp. (0251) 322185, 328383, 322138

Fax. (0251) 328382, 380588

E-mail: criansci@indo.net.id